



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 30 (tiga puluh)
Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI.
Hari, Tanggal	: Senin, 19 September 2022
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: M. Sarmuji., S.E., M.Si/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan tentang permasalahan investasi terkait dengan pelayanan OSS (Sistem Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).
Hadir	: 1. 34 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM RI, saudara Dr. Achmad Idrus, MM. Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM RI, saudara Dr. Achmad Idrus, MM. pada pukul 10.19 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 19 September 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji., S.E, M.Si.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi / BKPM RI agar segera memperbaiki implementasi OSS agar lebih efektif.
2. Komisi VI DPR RI meminta Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi / BKPM RI untuk meningkatkan sistem keamanan piranti lunak dan infrastruktur jaringan mengingat maraknya isu serangan cyber belakangan ini.
3. Komisi VI DPR RI meminta Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi / BKPM RI untuk segera mengatasi permasalahan terhambatnya Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung akibat belum terbitnya Peraturan Daerah yang mengatur pungutan retribusi PBG, serta berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait.
4. Komisi VI DPR RI meminta Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi / BKPM RI untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah khususnya terkait pelayanan terpadu dalam rangka penyuluhan sehingga terjadi percepatan perijinan berusaha khususnya bagi usaha mikro.
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi / BKPM RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 11.33 WIB.

**DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN
MODAL KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM RI,**

Ttd.

DR. ACHMAD IDRUS, MM

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**M. SARMUJI., S.E, M.Si
A-318**